



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019- 2024**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dapat menyusun “PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019-2024”

Sektor Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini, hal ini nampak bahwa sebagian besar masyarakat yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 76 Desa / Kelurahan pantai menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya ikan (Aquatic Resources).

Walupun signifikannya peranan sektor Kelautan dan Perikanan bagi kehidupan masyarakat di daerah ini, namun pada sisi lain masih ditemui berbagai permasalahan yang mengusik kehidupan masyarakat pesisir khususnya petani dan nelayan, hal tersebut terlihat pada sumberdaya manusia yang terbatas, kemampuan dan ketrampilan baik aparat pembinan maupun petani dan nelayan masih terbatas serta sarana dan prasaranan yang sangat terbatas, sering terjadinya Illegal Fishing, juga masalah kekurangan modal usaha yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam potensial yang ada.

Menyimak akan pentingnya peranan sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sedang di sisi lain masih ditemui berbagai masalah sebagai faktor penghambat maka perlu dilakukan perencanaan yang taktis dan strategis sehingga secara bertahap baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk mengeminir faktor-faktor penghambat yang dihadapi, agar pada suatu periode tertentu, peranan sektor Kelautan dan Perikanan menjadi unggulan di daerah ini.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman yang statis dan strategis guna keberhasilan pembangunan di Sektor Kelautan dan Perikanan kedepan.

Ba'a, 12 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rote Ndao,



Drs. BENAY FORAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680121 199403 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematikan Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	37
3.2. Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3. Telaan Renstra K/L dan Renstra	39
3.4. Telaan RTRW dan KHLS	41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	42
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu unsur manajemen dalam rangka menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang di tetapkan, memiliki peran penting untuk keberhasilan organisasi tersebut. Perencanaan strategi sebagai salah satu bentuk perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi, termasuk lembaga publik pemerintahan bahkan sampai pada tingkatan terendah sekalipun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun RPJMD tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Di dalam Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Dokumen Renstra Kelautan

dan Perikanan ini merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Tahun 2019-2024.

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, selain mengacu kepada RPJMD, juga mengandung Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak-pihak lain yang terkait lainnya untuk penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan pertanian dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Perubahan Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sampai tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, akhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Menjadi payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2021-2024.

2. Tujuan:

Tujuan Perubahan Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Untuk menyusun Program dan Kegiatan tahunan dengan skala prioritas pembangunan daerah khususnya sektor Kelautan dan Perikanan;
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kelautan dan Perikanan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kelautan dan Perikanan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote, maka uraian tugas secara umum dijelaskan sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RUMUSAN TUGAS :

Merumuskan kebijakan tugas pokoknya, Dinas Kelautan dan Perikanan yang kesekretariatan, perikanan tangkap dan pengawasan, perikanan budidaya, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan ekosistem, pembinaan usaha dan pengolahan hasil, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan masyarakat.

URAIAN TUGAS :

1. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
4. Merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
6. Menindaklanjuti temuan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
7. Mengkoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Merumuskan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dinas;
9. Merumuskan sasaran kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi Perikanan Tangkap dan Pengawasan, Perikanan Budidaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil untuk tersedianya sarana dan prasarana;
10. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyampaian telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta terkait kebijakan Kelautan dan Perikanan di daerah;
11. Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan aset agar terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;

12. Mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan Pengendalian Internal, Laporan Keuangan dan Aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta motivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program dan/atau kegiatan;
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

RUMUSAN TUGAS :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar

URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;

3. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
4. Mengkoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
6. Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
7. Mengkoordinir penyiapan data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
8. Membagi tugas, memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
9. Mengkoordinir penyusunan program/kegiatan di lingkup dinas agar tersedi program/kegiatan yang akomodatif dan partisipatif;
10. Mengkoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dinas;
11. Mengkoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan Kelautan dan Perikanan di daerah;
12. Menganalisa kebutuhan pegawai dan membagi seluruh staf dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
13. Mengkoordinir penyusunan laporan Pengendalian Internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan aset serta Laporan Kinerja dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
14. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

15. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotifasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
16. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 Kasubag

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

C. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN

RUMUSAN TUGAS :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap dan pengawasan meliputi pengembangan dan teknologi perikanan tangkap, pengawasan, pengendalian sumberdaya ikan dan peraturan kelembagaan perikanan sarana dan prasarana perikanan tangkap berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perikanan tangkap dan Pengawasan berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui operasi pengawasan untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Melakukan identifikasi dan standarisasi teknis sarana dan prasarana perikanan tangkap, melalui kajian teknis sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
6. Melaksanakan analisis pengembangan teknologi terapan penangkapan ikan;
7. Melakukan identifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
8. Melaksanakan identifikasi, standarisasi, evaluasi dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;

9. Melaksanakan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan;
10. Melakukan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan langsung atau pihak lain yang terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
11. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
12. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan,
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap,
- 3) Seksi Sarana Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

D. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

RUMUSAN TUGAS :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Meliputi Pengembangan Dan Teknologi Perikanan Budidaya, Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Konservasi Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Untuk Pemanfaatan Dan Pengembangan Perikanan Budidaya, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perikanan Budidaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melakukan identifikasi dan standarisasi teknik pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya melalui kajian teknis untuk memperoleh standarisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;

5. Melakukan pembinaan dan evaluasi pengembangan teknologi perikanan budidaya melalui bimbingan teknis dan koordinasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas;
6. Melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemberdayaan potensi dan penataan ruang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan kawasan;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan melalui pengamatan dan identifikasi untuk pencegahan timbulnya penyakit/parasit ikan;
8. Melakukan kajian dan konservasi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan untuk perlindungan dan kelestarian sumber hayati;
9. Memberikan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan kegiatan di Bidang Perikanan budidaya, Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
10. Melakukan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan langsung atau pihak lain yang terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
11. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotifasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
12. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan dan Teknologi Perikanan Budidaya,
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya,
- 3) Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK).

E. KEPALA BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL

RUMUSAN TUGAS :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan usaha dan pengolahan hasil meliputi pengembangan usaha dan peningkatan sumber daya manusia, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran promosi dan investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keselarasan dalam pengaturan, pelayanan dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan.

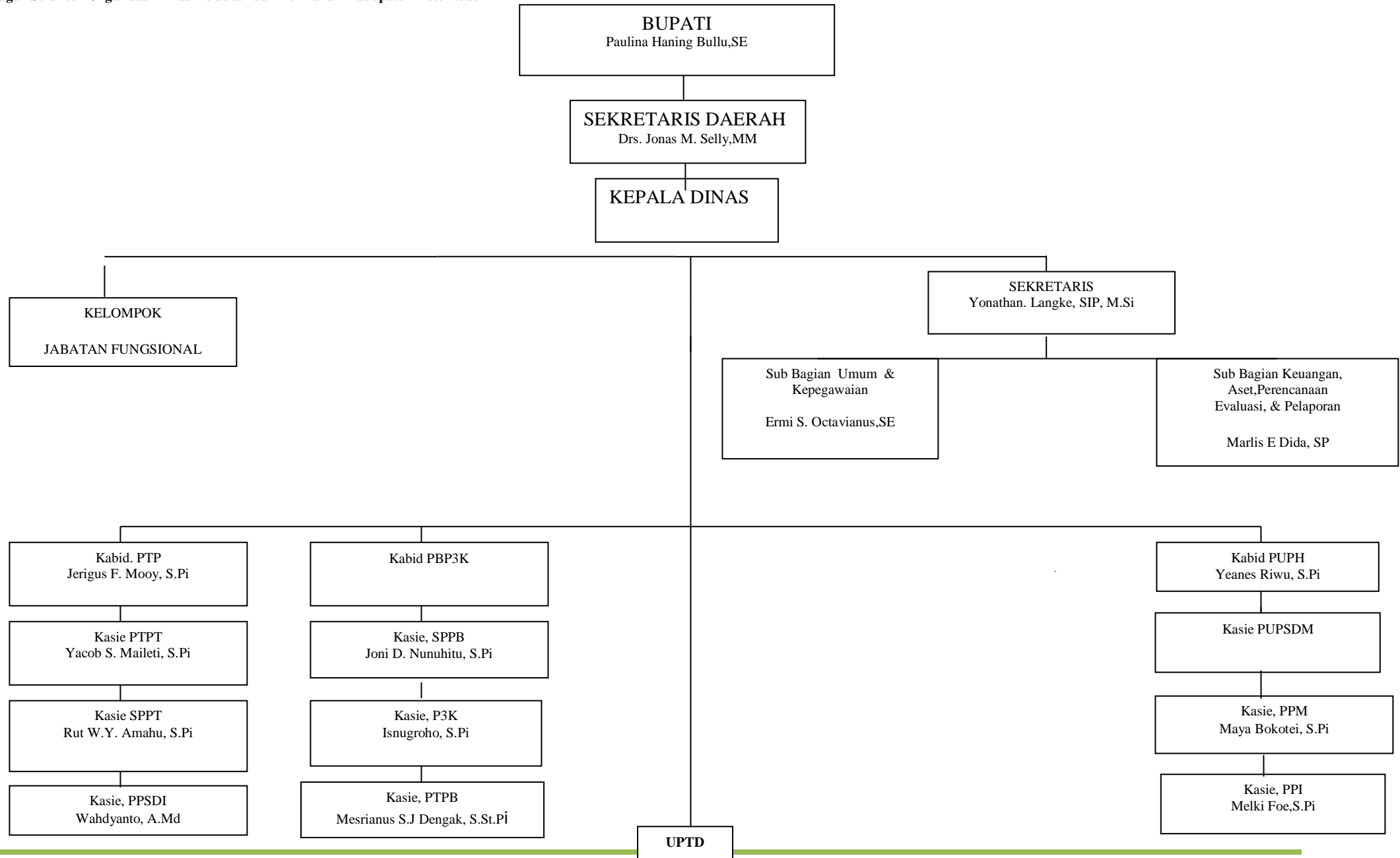
URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyiapkan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan di kabupaten;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
6. Menyiapkan perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
7. Menyiapkan perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
8. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
9. Membimbing dan mengawasi kegiatan pengolahan dan pembinaan mutu melalui pnerapan teknologi tepat guna;
10. Melaksanakan dan memantau penyebaran informasi pasar melalui publikasi agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pelaku usaha;
11. Melaksanakan kegiatan promosi investasi melalui publikasi, jaringan investasi dan pameran untuk meningkatkan investasi bidang kelautan dan perikanan;
12. Melakukan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan langsung atau pihak lain yang terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
13. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotifasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
14. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha,
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, dan
 - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi.

2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas daerah kabupaten rote ndao, maka struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
2. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi, & Pelaporan
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan,
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap,
 - 3) Seksi Sarana Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
4. Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Teknologi Perikanan Budidaya,
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya,
 - 3) Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK)
5. Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha,
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, dan
 - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 23 orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pegawai pria sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan 6 (enam) orang, dari status kepegawaian maka 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 0 orang CPNS, sedangkan menurut pangkat dan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III 19 (sembilan belas) orang golongan II sebanyak 2 (dua) orang.

Dari tingkat pendidikan dapat diperinci, sebagai berikut :

Pasca Sarjana (S2)	: 1 orang
S1 (Sarjana/Diploma-IV)	: 18 orang
Sarmud/Diploma III	: 1 orang
SLTA/Sederajat	: 3 orang

Selain sumberdaya manusia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao memiliki sumberdaya lahan dan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi. Lahan lokasi perkantoran meliputi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan terletak dikompleks Perkatoran Bumi Ti'i Langga Permai, Kolam Air Tawar dengan luasan 4.800 m² terletak di Kel. Mokdale, Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 412 m² terletak di Kel. Namodale Blok M serta Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan seluas 7000 m² di Kel. Metina Tulandale

Tabel data PNS/CPNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Pangkat/Gol	Tahun										Ket
		2014	2015	2016	2017	2108	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gol IV	4	2	2	3	4	4	2	-	-	-	
2	Gol III	16	21	20	22	16	19	19	-	-	-	
3	Gol II	6	7	6	4	4	4	2	-	-	-	
4	Gol I		1	1	1	1	-	-	-	-	-	
Jumlah		26	31	29	29	25	27	23	-	-	-	

Gambaran Aset Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel diwah ini

DATA ASET DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
NO	JENIS BARANG	VOLUME	JUMLAH	KET
1	Gedung Bangunan	Unit	7	Baik
2	Kendaraan roda dua (2)	Unit	14	8 unit rusak berat
3	Kendaraan roda empat (4)	Unit	5	4 Baik, 1 rusak berat
4	Tanah	Bidang	3	Baik
5	Global Positioning System (GPS)	Unit	1	Baik
6	Alat produksi lain-lain	Unit	1	Baik
7	Mesin Ketik	Buah	3	1 buah rusak berat

8	Lemari Besi	Buah	1	Baik
9	Filing Besi	Buah	2	Kurang baik
10	Brand Kas	Buah	2	1 Rusak berat, 1 baik
11	Lemari Kaca	Buah	2	Baik
12	Lemari Arsip	Buah	15	6 kurang baik, 9 baik
13	White Board	Buah	4	Kurang Baik
14	AC	Unit	1	Baik
15	Meja Rapat	Buah	3	Kurang Baik
16	Kursi Putar	Buah	1	Rusak Berat
17	Kursi Rapat	Buah	35	30 Kurang Baik
18	Meja Biro	Buah	5	4 kurang baik, 1 rusak berat
19	Meja Kerja	Buah	69	35 baik, 24 Kurang Baik, 10 rusak berat, 24 kurang baik
20	Meja Kerja Pejabat eselon	Buah	2	Baik
21	Sofa	Set	1	Kurang Baik
22	Kursi Plastik	Buah	40	20 rusak berat, 20 kurang baik
23	Kursi Kerja	Buah	64	35 baik, 10 rusak berat, 29 kurang baik
24	Laptop	Unit	11	1 kurang baik, 10 baik
25	Kipas Angin	Buah	4	Rusak Berat
26	Komputer	Unit	5	2 Rusak Berat, 3 kurang baik
27	Printer	Unit	11	Baik
28	UPS	Unit	1	Baik
29	Kamera	Unit	1	Baik
30	Pesawat telpon	Buah	3	Rusak Berat
31	Handy Talky	Buah	7	Rusak Berat
32	Wireless Amplifier	Buah	1	Baik

33	Slide Projektor	Unit	1	Baik
34	Instalasi Listrik	Unit	1	Baik
35	Instalasi Jaringan Air Bersih	Unit	1	Kurang Baik
36	Timbangan	Buah	1	Rusak Berat
37	Genset	Buah	1	Baik
38	Tangga aluminium	Buah	1	Baik

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao T.A. 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T.C. 23)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Produksi perikanan Tangkap (ton)	√		4.260	4.825	5.727	6.670	3.529	2.746	3.259	3.310	3.361	3.696	64%	68%	58%	50%	105%
II	Produksi budidaya rumput laut (ton)	√		15.000	18.000	20.000	25.000	15.746	18.230	18.230	16.074	15.777	16.542	122%	101%	80%	63%	105%
III	Konsumsi ikan (kg/kapita)	√		25,15	27,70	30,40	32,80	43,88	22,60	22,88	42,58	42,58	42,58	90%	83%	140%	130%	97%
IV	Cakupan bina kelompok nelayan	√		1,50	1,17	4,10	35,69	0,36	1,50	1,17	4,10	35,69		100%	100%	100%	100%	0%

Tabel T-C 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Rote
 Ndao

Program Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Ratio anggaran pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
I Adminstrasi Perkantoran	513.680.550	468.548.500	440.501.000	372.730.000	433.530.000	493.235.600	452.322.050	418.536.400	340.185.750	395.754.260							
1 Penyediaan jasa surat menyurat	2.155.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.402.000	824.000	1.079.000	1.079.000	1.305.000	65,06	62,90	82,37	82,37	99,62	1.479.000	1.137.800
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.796.000	54.924.000	66.170.000	76.170.000	31.470.000	55.978.100	47.827.450	50.761.150	57.531.450	20.722.700	89,14	87,08	76,71	75,53	65,85	58.306.000	46.564.170
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	5.200.000	4.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	2.818.800	2.393.500	3.033.000	2.334.700	2.761.050	54,21	59,84	40,44	31,13	27,61	6.840.000	2.668.210
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.450.000	92.450.000	96.050.000	96.050.000	96.050.000	92.330.000	92.450.000	96.050.000	96.050.000	92.280.000	99,87	100,00	100,00	100,00	96,07	94.610.000	93.832.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.870.000	2.499.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	74,80	99,96	100,00	100,00	100,00	2.500.000	2.373.800
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.000.000	3.000.000	2.995.000	1.050.000	100,00	100,00	100,00	99,83	35,00	3.030.000	2.639.000
8 Penyediaan alat tulis kantor	24.529.150	21.839.500	30.008.500	15.000.000	20.000.000	24.526.250	21.827.500	30.008.000	15.000.000	20.000.000	99,99	99,95	100,00	100,00	100,00	22.275.430	22.272.350

9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.031.400	19.254.000	15.000.000	10.000.000	13.200.000	28.031.200	19.253.400	14.999.000	10.000.000	12.668.750	100,00	100,00	99,99	100,00	95,98	17.097.080	16.990.470
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	24.066.000	52.762.500	5.000.000	45.000.000	-	24.066.000	52.500.000	4.900.000	45.000.000	#DIV/0!	100,00	99,50	98,00	100,00	25.365.700	25.293.200
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	1.090.000	1.320.000	910.000	800.000	1.800.000	36,33	44,00	75,83	66,67	90,00	2.080.000	1.184.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	91.060.000	76.320.000	70.000.000	60.000.000	89.300.000	85.399.350	71.211.200	68.856.250	54.021.100	89.297.160	93,78	93,31	98,37	90,04	100,00	77.336.000	73.757.012
13	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	98.500.000	73.000.000	50.000.000	50.000.000	74.700.000	98.500.000	72.870.000	50.000.000	48.000.000	70.601.600	100,00	99,82	100,00	96,00	94,51	69.240.000	67.994.320
14	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT	100.309.000	92.885.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	98.139.900	92.780.000	44.840.000	44.974.500	35.768.000	97,84	99,89	99,64	99,94	79,48	65.638.800	63.300.480
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	535.215.000	592.500.000	130.473.390	110.000.000	145.860.000	168.278.000	573.939.950	130.353.000	127.207.500	144.689.000							
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	385.242.000	477.000.000	-	-	-	25.700.000	458.457.950	-	-	-	96,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	172.448.400	96.831.590
16	Pengadaan Instalasi Air, Listrik, Telepon dan LAN	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.990.000	-	-	#DIV/0!	99,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.000.000	998.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	15.000.000	9.992.500	10.000.000	#DIV/0!	100,00	99,93	100,00	#DIV/0!	7.000.000	6.998.500
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.973.000	115.500.000	110.473.390	100.000.000	135.860.000	142.578.000	115.482.000	110.363.000	117.215.000	134.689.000	99,98	99,90	117,22	99,14	0,00	122.361.278	124.065.400
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
19	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0

I	V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.947.000							
	20	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.947.000	0	0	0	#DIV/0!	99,47	2.000.000	1.989.400
V		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1.576.980.000	303.100.000	677.110.000	437.361.000	335.000.000	1.562.505.100	293.327.600	670.796.500	432.766.000	318.172.969							
	20	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	-	50.000.000	264.000.000	70.000.000	-	-	49.650.000	259.216.500	66.766.000	-	99,30	98,19	95,38	-	-	76.800.000	75.126.500
	21	Pengadaan sarana budidaya rumput laut	1.576.980.000	253.100.000	413.110.000	367.361.000	335.000.000	1.562.505.100	243.677.600	411.580.000	366.000.000	318.172.969	96,28	99,63	99,63	94,98	-	589.110.200	580.387.134
V	I	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut	287.710.000	351.442.500	322.830.000	321.460.000	310.000.000	133.720.200	350.787.292	309.177.400	321.215.450	297.741.067							
	22	Magang Penembangan SDM	83.000.000	51.370.000	51.370.000	-	-	75.509.200	50.971.000	44.833.100	-	-	99,22	87,27	-	-	-	37.148.000	34.262.660
	23	Pelatihan dan Pendidikan Teknisi Perbenihan Ikan	62.010.000	49.771.000	-	-	-	58.211.000	49.770.392	-	-	-	100,00	-	-	-	-	22.356.200	21.596.278
	24	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Dasa (ANTD) dan (ANT4)	142.700.000	250.301.500	271.460.000	321.460.000	310.000.000	-	250.045.900	264.344.300	321.215.450	297.741.067	99,90	97,38	99,92	96,05	-	259.184.300	226.669.343
V	I	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	114.000.000	46.396.500	-	-	65.000.000	111.365.800	45.609.000	-	-	64.299.200							
	25	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	56.000.000	46.396.500	-	-	65.000.000	55.830.800	45.609.000	-	-	64.299.200	-	-	-	-	-	33.479.300	33.147.800

	26	Operasi Pengawasan Perairan Laut	58.000.000	-	-	-		55.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.500.000	11.107.000
V I I I		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	605.866.950	1.182.423.600	212.501.000	818.540.000	774.015.450	407.097.700	942.483.900	212.040.050	814.421.950	766.846.000							
	27	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	70.000.000	124.921.500	-	-	-	9.058.000	122.760.000	-	-	-	98,27	-	-	-	-	38.984.300	26.363.600
	28	Demplot Pengembangan Budidaya	-	127.264.400	212.501.000	663.540.000	531.371.450	-	98.624.400	212.040.050	659.723.950	526.491.000	77,50	99,78	99,42	99,08	-	306.935.370	299.375.880
	29	Demplot Pengembangan Bibit Unggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	30	Pengembangan sarana pra sarana BBI	358.466.950	-	-	-	187.644.000	229.859.700	-	-	-	186.575.000	-	-	-	-	-	109.222.190	83.286.940
	31	Pengadaan Pakan Ikan	71.900.000	69.200.000	-	55.000.000	55.000.000	71.900.000	68.750.000	-	54.928.000	53.780.000	99,35	0,00	99,87	97,78	-	50.220.000	49.871.600
	32	Pengadaan Kebun Bibit Rumpun Laut	60.000.000	-	-	-	-	51.400.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.000.000	10.280.000
	33	Peningkatan dan Pengembangan BBI	45.500.000	661.037.700	-	100.000.000	-	44.880.000	652.349.500	-	99.770.000	-	98,69	0,00	99,77	0,00	-	161.307.540	159.399.900
	34	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah untuk Kawasan Minapolitan	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	0
I X		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.769.451.150	1.562.341.200	2.164.976.500	1.113.374.000	1.427.300.000	2.650.154.950	1.511.872.600	2.159.774.800	256.706.600	1.404.025.807							
	35	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan	-	255.550.000	274.250.000	120.000.000	227.900.000	-	252.460.000	272.892.500	116.051.600	225.823.200	-	98,79	99,51	96,71	99,09	175.540.000	173.445.460
	36	Pembangunan/ Rehabilitasi PPI	226.550.000	-	-	-	-	226.150.000	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	45.310.000	45.230.000
	37	Pengadaan Kapal	1.567.073.150	747.447.000	1.696.889.000	868.374.000	725.000.000	1.558.756.000	744.932.000	1.694.740.000	19.000.000	716.195.239	99,47	99,66	99,87	2,19	98,79	1.120.956.630	946.724.648
	38	Pengadaan Mesin Kapal	-	265.444.200	-	-	150.000.000	-	263.875.100	-	-	144.048.000	0,00	99,41	-	-	96,03	83.088.840	81.584.620
	39	Pengadaan Alat											98,43	99,61		99,92	99,34		

	Tangkap Pukat (Monofilamen + multifilamen)/Gill net	825.028.000	143.100.000	-	50.000.000	256.400.000	812.115.000	142.540.000	-	49.961.900	254.711.000			-			254.905.600	251.865.580
40	Pembuatan kartu nelayan dan penandaan kapal perikanan	150.800.000	150.800.000	150.800.000	75.000.000	68.000.000	53.133.950	108.065.500	149.234.800	71.693.100	63.248.368	35,23	71,66	98,96	95,59	93,01	119.080.000	89.075.144
41	Penguatan sistim pendataan dan informasi	-	-	43.037.500	-	-	-	-	42.907.500	-	-	-	-	99,70	-	-	8.607.500	8.581.500
X	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	782.569.650	346.003.000	310.000.000	210.000.000	250.000.000	735.428.350	333.566.557	254.497.800	206.870.700	238.819.300							
42	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	-	-	100.000.000	-	-	-	-	44.745.000	-	-	-	-	45	-	-	20.000.000	8949000
43	Kegiatan Promosi Lomba Masak serba Ikan	76.712.600	98.872.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	72.250.000	89.379.300	89.830.200	89.086.100	87.463.700	94,18	90,40	99,81	98,98	97,18	89.116.920	85.601.860
44	Pengembangan data log book Perikanan	26.625.050	-	-	-	-	25.898.750	-	-	-	-	97,27	-	-	-	-	5.325.010	5.179.750
45	Peningkatan konsumsi ikan	149.622.000	132.253.100	120.000.000	90.000.000	90.000.000	128.034.600	130.124.257	119.922.600	87.846.600	89.619.300	85,57	98,39	99,94	97,61	99,58	116.375.020	111.109.471
46	Rehabilitasi Gedung Beku (CSD)	150.000.000	-	-	-	-	149.000.000	-	-	-	-	99,33	-	-	-	-	30.000.000	29.800.000
47	Operasional Pabrik Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
48	Rehabilitasi Pabrik Es	212.000.000	-	-	-	-	199.600.000	-	-	-	-	94,15	-	-	-	-	42.400.000	39.920.000
49	Penyediaan sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi	167.610.000	-	-	-	40.000.000	160.645.000	-	-	-	32.045.000	96	-	-	-	80,11	41.522.000	38.538.000
50	Pengadaan cool box	-	69.377.900	-	-	-	-	68.774.000	-	-	-	-	99,13	-	-	-	13.875.580	13.754.800
51	Pengawasan kualitas ikan	-	45.500.000	-	30.000.000	30.000.000	-	45.289.000	-	29.938.000	29.691.300	-	99,54	-	99,79	98,97	21.100.000	20.983.660
X I	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	28.696.000	-	-	-	-	28.696.000	-	-	-	-							
53	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	28.696.000	-	-	-	-	28.696.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.739.200	5.739.200

X I I	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	-	46.179.800	-	-	-	-	43.356.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 Konservasi perairan Kabupaten Rote Ndao	-	46.179.800	-	-	-	-	43.356.500	-	-	-	93,89	-	-	-	-	-	9.235.960	8.671.300
X I I I	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	209.418.000	94.100.000	165.000.000	102.000.000	100.000.000	172.079.500	93.133.000	162.596.700	97.711.200	95.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 Identifikasi dan pendataan perairan umum	60.000.000	-	-	-	-	58.079.500	-	-	-	-	96,80	-	-	-	-	-	12000000	11.615.900
	56 Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya	49.418.000	-	-	-	-	40.487.000	-	-	-	-	81,93	-	-	-	-	-	9.883.600	8.097.400
	57 Penunjang Pengembangan Mata Pencapaian Perikanan	100.000.000	94.100.000	165.000.000	102.000.000	100.000.000	73.513.000	93.133.000	162.596.700	97.711.200	95.325.000	73,51	98,97	98,54	95,80	95,33	112.220.000	104.455.780	
	58 Pengembangan BBI Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
X I V	Program Pengembangan Perikanan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	60.000.000	-	-	-	-	48.800.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	59 Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut	60.000.000	-	-	-	-	48.800.600	-	-	-	-	81,33	-	-	-	-	-	12.000.000	9.760.120
X V	Program Pengembangan Sistim Informasi dan Statistik Perikanan Budidaya	-	-	-	50.839.000	-	-	-	-	50.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya	-	-	-	50.839.000	-	-	-	-	50.785.000	-	-	-	-	99,89	-	-	10.167.800	10.157.000
	TOTAL	7.483.587.300	4.993.035.100	4.423.391.890	3.536.304.000	3.850.705.450	6.511.361.800	4.640.398.449	4.317.772.650	2.647.870.150	3.735.619.603	87,01	92,94	97,61	74,88	97,01	4.857.404.748	4.370.604.530	

Pada Tabel T-C. 23 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN dapat dilihat pencapaian kinerja perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao masih terdapat banyak kesenjangan pelayanan ke masyarakat yang mana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya yang belum mencapai target selama 5 (lima) tahun. Faktor penghambatnya antara lain : Keterbatasan sarana pra sarana, keterbatasan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan potensi alam secara optimal dan berkelanjutan, rendahnya kualitas bibit yang digunakan, faktor cuaca juga terkadang dapat mempengaruhi menurunnya produksi. Sedangkan tingkat konsumsi ikan rasionya telah mencapai atau melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sudah tinggi.

Dalam Kurun Waktu Tahun 2014 – 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat Sumber Pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian dapat dilihat pada lampiran T.C24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Pada tabel T-C.24 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 – 2017 rasio antara realisasi dan anggaran cukup tinggi yaitu berkisar antara 87% - 97 % yang mana realisasi/penyerapan anggaran hampir sama / seimbang dengan total anggaran yang di peroleh Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan rasio antara realisasi dan anggaran dengan capaiannya 74 % hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat gagal lelang dan pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena akan melewati batas waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap I (satu), namun kalau di lihat dari anggaran yang di peroleh Perangkat Daerah tiap tahunnya mengalami penurunan yang merupakan faktor penghambat dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat nelayan tangkap maupun nelayan pembudidaya yang tersebar di 58 Desa Pantai dalam 10 Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao.

Peranan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan di dukung oleh saran pra sarana tangkap dan budidaya oleh karena itu di harapkan pada tahun – tahun mendatang adanya penambahan anggaran bagi Perangkat Daerah tersebut.

Selain itu pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan dan

peningkatan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan yang berbasis keunggulan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia :

1. Potensi lestari perikanan tangkap sebesar 17.875 ton/tahun dengan Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 14.300 ton/tahun, meliputi komoditi unggulan yakni ikan pelagis, demersal dan non ikan seperti ikan tuna, ikan cakalang, kuwe, tongkol, kembung, tembang, kerapu, kakap, gurita, teripang dan lain-lain. Data statistik tahun 2018 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya perikanan tangkap sebesar 3.316 Ton/Tahun.
2. Potensi budidaya rumput laut dengan luas lahan 32.000 ha, tersebar di 58 desa pantai, meliputi komoditi unggulan berupa rumput laut jenis *cotonii, sp.* Sampai dengan tahun 2018 baru dapat dimanfaatkan sekitar 2.210 ha (6,90%).
3. Potensi perikanan budidaya pantai dengan luas 12.937 ha, terdapat di 10 (sepuluh) Kecamatan yang dapat dijadikan tambak ikan bandeng, udang, dan industri garam rakyat. Sampai dengan tahun 2017 baru dapat dimanfaatkan 5 ha (0,04 %).
4. Potensi perikanan budidaya perairan dengan luas 127 ha, yang dapat dikembangkan untuk kolam ikan mas, karper, bawal, nila dan lele. Sampai dengan tahun 2017 baru dapat dimanfaatkan sebanyak 4 ton/ ha.

Pencapaian hasil (kinerja) Perangkat Daerah Kelautan dan Perikanan dalam periode 2014-2019 diukur dari indikator proses (*process indicators*) dan indikator keluaran (*output indicators*). Indikator proses mencakup adanya konsistensi kebijakan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator keluaran merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam periode tahun 2014-2019, antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan

Ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan meliputi : ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem budidaya laut. Secara umum kondisi ekosistem laut dan pesisir telah mengalami degradasi fisik dengan laju degradasi yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya.

Ekosistem terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terumbu karang di perairan Kabupaten Rote Ndao diperkirakan ada sekitar 160 jenis karang dan 15 famili yang merupakan tempat hidup dari 350 jenis ikan dan biota laut lainnya, dengan luas ekosistem terumbu karang sebesar 714 Ha.
2. Terdapat hamparan terumbu karang hampir di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Rote Ndao dan merupakan habitat/tempat pemijahan, mencari makan, dan pengasuhan dari berbagai jenis ikan.

Penyebab kerusakan terumbu karang antara lain adalah (i) kegiatan manusia : penangkapan dengan alat yang merusak dan eksploitasi berlebihan, pencemaran dan sedimentasi, perencanaan kurang tepat, dampak pembangunan di darat dan (ii) faktor alam: topan, gempa dan banjir.

Ekosistem mangrove di Kabupaten Rote Ndao, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mangrove merupaka/n ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir dan laut karena memiliki fungsi proteksi, ekologi, dan ekonomi. Disamping itu, wilayah mangrove merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*), asuhan (*nurseryground*), dan tempat mencari makan (*feeding ground*), berbagai jenis biota. Luas Vegetasi mangrove adalah 1.232 Ha.
2. Terjadinya penggunaan ruang dengan pertanian, permukiman, pertambangan, perhubungan laut dan pariwisata menyebabkan sebagian wilayah mangrove tidak dapat dipertahankan.

Ekosistem padang lamun (*seagrass*) dengan luas 1.429,6 Ha, merupakan penyangga produktivitas primer pendukung kehidupan biota laut baik secara ekologi, fisiologi dan biologi, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Padang lamun merupakan ekosistem penyangga pantai terhadap abrasi dan erosi serta sebagai perangkap sedimen dan penstabil substrat penyusun topografi dasar pantai serta sebagai penyedia bahan makan, pelindung dan reproduksi bagi kehidupan biota laut.
2. Penyebaran ekosistem padang lamun mencakup hampir seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Rote Ndao dan kondisinya masih cukup baik.

2. Sosial

a. Meluasnya Pemerataan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir mampu memperluas pemerataan dan hasil hasilnya melalui distribusi program dan kegiatan secara merata ke kecamatan-kecamatan untuk berbagai kegiatan berbasis masyarakat di wilayah pesisir dan daerah pedalaman yang potensial untuk budidaya air tawar.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan petani dan nelayan, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP);
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Program Peraturan dan Kelembagaan;
5. Program Pengelolaan Ekosistem dan konservasi;
6. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
8. Program Pengembangan manajemen bersama dan kerja sama kemitraan;
9. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengembangan usaha perikanan tangkap;
11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
13. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

b. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat,

Berbagai langkah sistematis dan terarah yang ditempuh dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, telah mendorong partisipasi masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas (masyarakat petani dan nelayan, LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya) terhadap sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

3. Ekonomi

a. Meningkatnya Pertumbuhan

Upaya pembangunan kelautan dan perikanan sampai tahun 2013 telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai kebijakan dan program, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator makro sebagai berikut

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (*strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan oleh karena itu sebagai negara yang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Selain itu lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (4) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan (5) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (6) sistem pengawasan,

terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi :

1. Kekuatan dan Kelemahan

1.1.Kekuatan

a. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Potensi dan jenis sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao sangat beragam, dimana potensi tersebut dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun. Selain itu terdapat juga berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Pada bagian berikut secara singkat dipaparkan gambaran potensi sumber daya tersebut, khususnya sumber daya yang dapat diperbaharui, yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya, baik budidaya laut, air payau, kolam air tawar,serta kondisi terumbu karang.

Kabupaten Rote Ndao memiliki luas lautan 2.376 Km² dan garis pantai sepanjang 330 Km, lebar garis pantai 7,2 Km dengan potensi sumberdaya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka digunakan pendekatan pembangunan kewilayahan.

b. Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia pembangunan sektor kelautan dan perikanan, meliputi petani dan nelayan sebagai berikut :

- 1) Petani Rumput laut : 10.453 KK/ 31.359 Jiwa
- 2) Nelayan : 2.890 KK/ 31.359 Jiwa

c. Sarana Penangkapan Ikan

Sarana penangkapan ikan terdiri dari armada kapal tangkap dan alat penangkapan ikan, sebagai berikut :

1. Armada

- a. Jukung : 1.652 Unit
- b. Perahu Tanpa Motor : 62 Unit
- c. Kapal Motor : 350 Unit
- d. Ketinting : 482 Unit
- e. Perahu Layar : 59 Unit

2. Alat Tangkap

- Bagan Apung : 16 Unit
- Bagan Tancap : 4 Unit
- Pancing Tangan : 1.920 Unit
- Rawai Dasar : 491 Unit
- Gill Net : 2.046 Piece
- Jala Tebar : 83 Unit
- Purse Seine : 26 Unit
- Pancing Tonda : 583 Unit

d. Prasarana Perikanan

Potensi lain yang dimiliki adalah prasarana, yaitu :

- 1.) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) : 1 buah
- 2.) Pelabuhan perikanan rakyat : 24 buah.

e. Kelembagaan Kelautan dan Perikanan

Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, seperti :

- 1. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI);
- 2. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan;
- 3. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kelautan dan Perikanan;

1.2. Kelemahan

- a. Sebagian besar usaha perikanan tangkap di Kabupaten Rote Ndao masih merupakan nelayan tradisional;
- b. Struktur armada didominasi oleh usaha perikanan tangkap skala kecil;
- c. Terjadinya praktek illegal fishing, unregulation dan unreported;
- d. Belum berkembangnya usaha perikanan budidaya;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- f. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut di beberapa kawasan;
- g. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia baik aparaturnya maupun petani dan nelayan,
- h. Lemahnya pengetahuan dan keterampilan para petani dan nelayan.

BAB III
ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya kuantitas pelayanan aparatur kepada masyarakat	Terbatasnya jumlah SDM aparatur kelautan dan perikanan	Terbatasnya dana serta Kurangnya aparat/tenaga teknis dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan
2.	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yaitu potensi sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung pengembangan pariwisata	Kurangnya data pendukung yang lengkap dalam menunjang pengelolaan wilayah pesisir	-Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas - Kurangnya pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan dan kelautan
3.	Rendahnya Mutu produksi perikanan, kurang berdaya saing	Minimnya kualitas SDM Aparatur, nelayan/petani rumput laut	-Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas - Minimnya pembinaan dan pelatihan dalam mengolah hasil perikanan.
4.	Terjadinya praktek illegal fishing	Kurangnya sosialisasi, sarana penunjang dalam melakukan operasi pengawasan	Minimnya regulasi yang mendukung program kelautan dan perikanan
5.	Kurangnya akses permodalan	Kurang nya jaminan usaha	Tidak tersedianya dana usaha perikanan
6.	Belum adanya pemasaran hasil secara periodik	perilaku nelayan yang belum bersifat ekonomi komersil	kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dan Alokasi dana yang terbatas

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa terdapat 6 masalah pokok yakni

1. Kurangnya kuantitas pelayanan aparatur kepada masyarakat
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yaitu potensi sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung pengembangan pariwisata
3. Rendahnya Mutu produksi perikanan, kurang berdaya saing
4. Terjadinya praktek illegal fishing
5. Kurangnya akses permodalan
6. Belum adanya pemasaran hasil secara periodik.

Melihat kondisi tersebut membawa sejumlah implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu :

1. **Pertama** : Kabupaten Rote Ndao harus mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan sumberdaya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya.
2. **Kedua** : Kabupaten Rote Ndao dituntut meningkatkan pengawasan demi menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. **Ketiga** : semakin terbukanya peluang bagi masyarakat lokal, utamanya petani dan nelayan, serta stakeholder lainnya untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada.
4. **Keempat** : Produk tersedia secara teratur dan berkesinambungan dan memiliki kualitas yang baik dan seragam dan juga :
5. **Kelima** : Produk perikanan harus dapat mengantisipasi dan menyiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu *property right*, isu *responsible fisheries*, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu ketenagakerjaan. Untuk ISO 14000, mensyaratkan bahwa produk sektor perikanan harus dihasilkan dari suatu proses produksi yang berwawasan lingkungan, dimana proses produksi tidak merusak tatanan, fungsi dan proses ekologis dan proses produksi tidak membahayakan pelaku produksi dan kesehatan atau jiwa konsumen. *SPS (Sanitary and Phytosanitary)* yang bersifat multidimensi, mencakup keamanan pangan (*Food Safety Attributes*), kandungan gizi (*Nutrition Attributes*). Oleh karena itu standarisasi produk dan proses perlu segera dikembangkan.

3.2. Telaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan VISI : “Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan BERKELANJUTAN bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”,

MISI : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan.”

Dalam mewujudkan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yakni :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pesisir bagi petani dan nelayan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia bagi petani rumput laut dan nelayan tangkap yang berwawasan manajemen usaha, teknologi dan inovasi meliputi produktivitas penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam rangka pembinaan, pertumbuhan, pengembangan dan penyuluhan terhadap pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan.

3.3. Telaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Korelasi antara Renstra Kementerian/Lembaga terhadap Renstra Perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ndao dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Jumlah produksi ikan berada pada tren yang positif yaitu pada 2019 sebesar 3.696 ton.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir 	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana pra sarana alat tangkap yang memadai

2	Jumlah produksi rumput laut sebesar 16.542 ton pada tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Sarana alat tangkap yang semi tradisional • Skala Usaha bersifat kecil dan sambilan • Masih Rendahnya Mutu produksi perikanan yang berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang • Belum tersedianya pemasaran • Minimnya SDM dalam mengolah produk yang berbasis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi
3.	<p>Potensi sumber daya alam pesisir belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan</p> <p>Aspek permodalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM yang masih rendah • Minimnya sarana prasarana/infrastruktur dan teknologi • Terjadinya praktek illegal fishing • Virus penyakit • Keterbatasan aspek permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kualitas SDM Aparatur, nelayan/petani rumput laut • Penggunaan Sarana alat tangkap yang semi tradisional • Masih lemahnya hukum yang mengatur illegal fishing Rendahnya Mutu produksi perikanan Alokasi dana yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan dan kelautan • Pemanfaatan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis • Penataan dan penegakan hukum • Pembentukan kelembagaan yang mandiri • Peningkatan Pembinaan SDM pengelolaan Sumberdaya perikanan dan kelautan • Ketersediaan modal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Minapolitan di 2 (dua) lokasi yaitu Kecamatan Rote Barat Daya (Desa Oebou) dan Rote Timur (Desa Daima)	Kawasan Strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengaturan Zonasi	Alokasi dana yang terbatas dan kurangnya koordinasi	Tersedianya dukungan dana serta adanya dukungan dan kerjasama semua pihak terkait.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun rumusan Isu-isu Strategis berupa :

1. Produksi masih rendah
2. Skala Usaha bersifat kecil dan sambilan
3. Penggunaan Sarana alat tangkap yang semi tradisional
4. Potensi sumber daya alam pesisir belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, karena keterbatasan sumberdaya manusia (minimnya pelatihan karena keterbatasan alokasi dana), sarana prasarana/infrastruktur dan teknologi yang mengakibatkan masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Belum adanya pemasaran hasil secara periodik
5. Kurangnya akses Permodalan
6. Minimnya kelembagaan yang dibentuk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah: ” Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan.”

4.2. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah : “Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan”.

Tabel T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	1. Produksi perikanan Tangkap (ton) 2. Produksi budidaya rumput laut (ton) 3. Produksi perikanan budidaya (ton) 4. Konsumsi ikan (kg/kapita) 5. Cakupan bina kelompok nelayan	3.529 15.746 5,11 43,88 0,36	3.697 16.000 6 44,88 0.38	3.738 16.500 7 46,88 0,42	3.820 17.000 8 47,88 0,45	4.124 17.500 9 48,88 0,47	4.292 18.000 10 49,88 0,49

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Rote Ndao untuk mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang tercermin dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk mencapai sasaran strategis jangka menengah.
2. Potensi sektor kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada rakyat dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan berpijak pada paradigma “Bermartabat” (Bertumbuh, Makmur, Taat dan Bersahabat) dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan, serta berusaha untuk mengurangi ketertinggalan daerah Kabupaten Rote Ndao dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2. Kebijakan

Untuk memperkuat strategi di atas, maka perlu dilakukan suatu kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan, kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Sentralisasi Kegiatan dan Pelayanan Perikanan.
3. Transformasi Kegiatan Usaha Kelautan dan Perikanan berbasis penangkapan, budidaya, pemberdayaan dan pemasaran.
4. Peningkatan teknologi mutu penangkapan, budidaya, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran.
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di tingkat nelayan, petani dan aparatur pembina.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang “BERMARTABAT” dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Parawisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan			
Misi II : Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Parawisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan bantuan sarana pra sarana perikanan tangkap dan nelayan 2. Meningkatkan kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan 3. Meningkatkan promosi dan sosialisasi produk perikanan tangkap dan budidaya 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan 5. Pemberdayaan terhadap kelompok nelayan 6. Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan sarana pra sarana perikanan tangkap dan budidaya 2. Pembinaan sumber daya manusia nelayan 3. Peningkatan inovasi terhadap produk perikanan tangkap dan budidaya 4. Peningkatan promosi dan sosialisasi 5. Peningkatan bantuan modal usaha 6. Pengembangan sistem informasi pemasaran hasil tangkapan dan pembudidayaan bagi nelayan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come dan Kegiatan (out put))	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
											Target	Rp x 000	Target	Rp x 000	Target	Rp x 000	Target	Rp	Target	Rp x 000			Target	Rp		
1	2	4					5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22		
		3.01	3.01	1	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur, Tersedianya																		
		3.01	3.01	1	01	01	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	12	87,691	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	12	87,691	DKP	Rote Ndao
		3.01	3.01	1	01	02	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	unit	4	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33,000	DKP	Rote Ndao	
		3.01	3.01	1	01	03	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas operasional, jasa perbaikan peralatan kerja, terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16	unit	17	159,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	159,250	DKP	Rote Ndao	
		3.01	3.01	1	01	04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	orang	12	96,050	12	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	12	96,050	DKP	Rote Ndao

		3.01	3.01	1	01	05	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Tersusunnya profil OPD, Renja Perangkat Daerah, LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi Renja	1	dokumen	7	25,000	-	-	-	-	-	-	7	25,000	DKP	Rote Ndao
--	--	------	------	---	----	----	--	--	---	---------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----	-----------

		3.01	3.01	1	01	06	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kompetensi (bimtek, seminar, work shop) bagi aparat, fasilitasi administrasi kepegawaian, ABK, ANJAB	0	orang	26	14,625	-	-	-	-	-	-	26	14,625	DKP	Rote Ndao
		3.01	3.01	1	01	07	Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ke luar daerah	34	kali	8 kali (Provinsi NTT) 22 kali (kabupaten)	154,819.5	-	-	-	-	-	-	8 kali (Provinsi NTT) 22 kali (kabupaten)	154,819.5	DKP	Rote Ndao
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	0.36		0.38	1,388,211							0.38	1,388,211		
		3.01	3.01	1	15	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah kelompok binaan yang mendapat bantuan dan	5	Klpk	10	75,000	0	-	0	-	0	-	10	75,000	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	02	Pengadaan Kapal	Jumlah kapal yang terdistribusi	7	unit	7	741,269	-	-	0	-	0	-	7	741,269	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	03	Pengadaan Mesin Kapal	Jumlah mesin kapal yang terdistribusi	10	unit	7	90,000	-	-	-	-	-	-	7	90,000	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	04	Pengadaan Gill Net	Jumlah gillnet yang terdistribusi	125	piece	125	137,500	-	-	-	-	-	-	125	137,500	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	05	Pendaftaran dan pendampingan kartu nelayan	Jumlah kartu nelayan yang dicetak untuk nelayan	100	buah	100	60,711.5	-	-	-	-	-	-	100	60,711.5	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Dasa (ANTD) dan (ANT4)	Jumlah nelayan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ahli nautika dasa (ANTD) dan (ANT4)	10	orang	7	215,300	-	-	-	-	-	-	7	215,300	DKP	Banyuwangi (Jawa Timur)
		3.01	3.01	1	15	07	Pengadaan Alat Tangkap Jaring cumi	jumlah alat tangkap jaring cumi yang terdistribusi	0	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	08	Pengadaan sarana bantu cool box dikapal	jumlah cool box yang terdistribusi	0	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	10 Kec.
		3.01	3.01	1	15	09	Pengadaan Jaket Pelampung (Life Jacket)	Jumlah jaket pelampung	0	unit	150	34,500	-	-	-	-	-	-	150	34,500	DKP	Rote Ndao
		3.01	3.01	1	15	10	Informasi dan Data Statistik Perikanan Tangkap	Jumlah Rumah Tangga (RTP) Tangkap	2,991	KK	3,096	23,931	-	-	-	-	-	-	3,096	23,931	DKP	Rote Ndao

						Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatkan Jumlah Konsumsi Ikan	43.88	kg/kpta/thn	44.88	344,000.00									44.88	344,000			
	3.01	3.01	1	16	02	Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah	Terlaksananya jumlah kegiatan promosi produk unggulan daerah	0	kali	2	115,658	0	-	0	0	0	0	0	0	0	2	115,658	DKP	Prov. NTT dan luar NTT
	3.01	3.01	1	16	03	Promosi Lomba Masak serba Ikan/Gemarikan	Terlaksananya jumlah kegiatan lomba masak serba ikan dan forikan	3	kali	3	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90,000	DKP	Kupang, Jakarta
	3.01	3.01	1	16	04	Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)	Tingkat angka konsumsi ikan	42.58	Kg/kap/thn	46.88	80,000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	46.88	80,000	DKP	Rote Ndao, Kupang
	3.01	3.01	1	16	05	Penyediaan sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi	Jumlah sarana pra sarana yang terdistribusi ke pedagang ikan	20	unit	10	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	29,000		Rote Ndao
	3.01	3.01	1	16	06	Pendataan / identifikasi kelompok nelayan, Pengolah hasil dan Pengawasan kualitas ikan	Tersedianya data statistik pengolahan dan pemasaran hasil	12	klpk	80	29,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	29,342	DKP	Pasar pedagang ikan
	3.01	3.01	1	16	07	Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan khas	Jumlah produk olahan hasil perikanan	0	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
	3.01	3.01	1	16	08	Pengadaan Cool Box	jumlah cool box yang terdistribusi bagi pedagang ikan	10	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
				16	09	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pengolah dan pemasara ikan terbina	0	klpk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Rote Ndao
						Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	19,280	ton	19,703	1,031,629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,703	1,031,629	DKP	10 Kec.
	3.01	3.01	1	17	01	Pengadaan Sarana Budidaya Rumpuk Laut	Tersedianya sarana budidaya rumput laut	7	paket	8	335,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8	335,000	DKP	10 Kec.
	3.01	3.01	01	17	02	Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya	Terlaksananya data hasil produksi budidaya	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	Rote Ndao
	3.01	3.01	1	17	03	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya pembinaan ekonomi kelompok budidaya	0	Klpk	10	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	45,000	DKP	10 Kec.

3.01	3.01	1	17	04	Demplot Budidaya Air Tawar	Jumlah Produksi perikanan budidaya air	5.11 ton	8	538,713	-	-	-	-	-	-	-	-	8	538,713	DKP	Rote Ndao	
3.01	3.01	1	17	05	Pengembangan sarana pra sarana BBI	Tersedianya pengembangan sarana dan prasarana BBI	1 paket	1	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000	DKP	Rote Ndao	
3.01	3.01	1	17	06	Pengadaan Pakan Ikan	Tersedianya pakan ikan	2400 Kg	500	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500	25,000	DKP	Rote Ndao	
3.01	3.01	1	17	07	Pengembangan Mata Pencaharian Perikanan	Jumlah kelompok yang mendapat program pengembangan mata pencaharian perikanan	2 kelompok	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	3.01	1	17	08	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah benih indukan ikan yang tersedia	0 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	Rote Ndao

		1	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan administrasi perkantoran	100%					2,349,413,375		2,570,431,400		2,870,174,540		#####		#####		
		3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		dokumen	0	-		50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		232,050,000		

			3	25	01	2.06	02	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	0	0	5	27,450,000	5	30,195,000	5	33,214,500	5	36,535,950	20	127,395,450	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.06	05	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Buku/Lembar	0	0	30/28,400	14,500,000	30/28,400	15,950,000	30/28,400	17,545,000	30/28,400	19,299,500	120/113,600	67,294,500	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.06	06	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran/Surat Kabar)	bulan	0	0	12	2,000,000	12	2,200,000	12	2,420,000	12	2,662,000	48	9,282,000	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.06	07	-	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	surat kabar /bulan	0	0	12	2,000,000	12	2,200,000	12	2,420,000	12	2,662,000	48	9,282,000	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.06	09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	kali	0	0	5	19,736,000	5	21,709,600	6	23,880,560	6	26,268,616	22	91,594,776	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.08			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		48,339,375		48,400,000		53,240,000		58,564,000		208,543,375		
			3	25	01	2.08	01	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materi surat menyurat	lembar	0	0	88	1,000,000	88	1,000,000	100	1,100,000	110	1,210,000	386	4,310,000	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.08	02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	bulan	0	0	12	47,339,375	12	47,400,000	12	52,140,000	12	57,354,000	48	204,233,375	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					0		91,500,000		91,500,000		143,350,000		156,685,000		483,035,000		
			3	25	01	2.09	02	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	unit	0	0	1	3,000,000	1	3,000,000	16	10,000,000	16	10,000,000	16	26,000,000	DKP	Rote Ndao		
											unit	0	0	1	40,000,000	1	40,000,000	2	80,000,000	2	88,000,000	2	248,000,000	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.09	02	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	0	0	5	3,500,000	5	3,500,000	6	3,850,000	7	4,235,000	23	15,085,000	DKP	Rote Ndao		
			3	25	01	2.09	09	-	Pemeliharaan /rehabilitasi /Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	unit	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	1	193,950,000	DKP	Rote Ndao		

		3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	cakupan bina kelompok nelayan			0	0	0,38	175,000,000	0,42	720,382,000	0,45	1,419,500,000	0,47	#####	0,49	#####		
		3	25	02	02.01		Pengelolaan Penangkapan	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,						75,000,000		620,382,000		807,500,000		888,250,000		#####		
		3	25	02	02.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Kapal < 3 GT		unit	0	0	0	-	0	-	7	100,000,000	7	110,000,000	14	210,000,000	DKP	Rote Ndao
								Tersedianya Kapal Multi purpose		unit	0	0	0	-	2	530,382,000	-	-	-	-	2	530,382,000	DKP	
								Tersedianya mesin kapal 16-30 PK		unit	0	0	0	-	1	15,000,000	25	625,000,000	25	687,500,000	51	1,327,500,000	DKP	Rote Ndao
								Tersedianya ukat/ Gill net		piece	0	0	40	75,000,000	40	75,000,000	40	82,500,000	40	90,750,000	160	323,250,000	DKP	Rote Ndao
		3	25	02	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	100%		0	0		100,000,000		100,000,000		612,000,000		673,200,000		#####		
		3	25	02	02.02	01	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Ahli Nautika Dasar (ANTD) dan (ANT4)		orang	0	0	0	-	0	-	10	350,000,000	10	385,000,000	20	735,000,000	DKP	Banyuwangi
		3	25	02	02.02	03	- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Jumlah kartu nelayan yang dicetak untuk nelayan		buah	0	0	0	-	0	-	100	77,000,000	100	84,700,000	200	161,700,000	DKP	Rote Ndao
								Jumlah kelompok binaan yang mendapat bantuan dan		kelompok	0	0	0	-	0	-	10	75,000,000	10	82,500,000	20	157,500,000	DKP	Rote Ndao
								Tersedianya dana hibah untuk 30 kelompok		kelompok	0	0	10	100,000,000	10	100,000,000	10	110,000,000	10	121,000,000	40	431,000,000	DKP	Rote Ndao
		3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya			0	0	20.245 ton	6,072,482,000	20.828 ton	6,681,230,200	21.633 ton	10,679,393,220	22.302 ton	#####	104.711 ton	#####		
		3	25	03	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan ekonomi kelompok budidaya	100%					782,482,000		890,730,200		1,109,803,220		#####		#####		
		3	25	03	02.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan ekonomi kelompok budidaya		kelompok	0	0	0	-	0	-	50	80,000,000	50	88,000,000	100	168,000,000	DKP	Rote Ndao

						Jumlah kelompok yang mendapat program pengembangan mata pencaharian perikanan		kelompok	0	0	0	-	0	-	5	50,000,000	5	55,000,000	10	105,000,000	DKP	Rote Ndao
3	25	03	02.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah demplot perikanan budidaya air tawar		demplot	0	0	11	782,482,000	18	860,730,200	18	946,803,220	18	1,041,483,542	65	3,631,498,962	DKP	Rote Ndao
3	25	03	02.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pembudidaya ikan yang baik dan berstandar		kelompok	0	0	0	-	6	30,000,000	6	33,000,000	6	36,300,000	18	99,300,000	DKP	Rote Ndao
3	25	03	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			0	0		5,290,000,000		5,790,500,000		9,569,590,000		#####		#####		
3	25	03	02.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Tersedianya data hasil produksi budidaya perikanan		dokumen	0	0	0	-	0	-	1	25,000,000	1	27,500,000	2	52,500,000	DKP	Rote Ndao
3	25	03	02.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana BBI		paket	0	0	1	285,000,000	1	285,000,000	1	313,500,000	1	344,850,000	4	1,228,350,000	DKP	Mokdale
3	25	03	02.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Tersedianya pakan ikan		Kg	0	0	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	400	23,205,000	DKP	Mokdale
						Tersedianya sarana budidaya perikanan laut		paket	0	0	0	-	0	-	10	3,175,040,000	10	3,492,544,000	20	6,667,584,000	DKP	
						Tersedianya sarana budidaya ikan sistem Keramba Jaring Apung		Paket	0	0	3	5,000,000,000	8	5,500,000,000	8	6,050,000,000	8	6,655,000,000	27	#####	DKP	Rote Ndao

		3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMSI IKAN		Kg/Kpt	0	0	44,88	490,000,000	46,88	565,000,000	47,88	679,500,000	48,88	747,450,000	49,88	#####		
		3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Tersedianya data statistik pengolahan dan pemasaran hasil		kelompok	0	0	0	50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		232,050,000		
		3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penyediaan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil		kelompok	0	0	70	50,000,000	70	55,000,000	70	60,500,000	70	66,550,000	280	232,050,000	DKP	Rote Ndao
		3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya SDM nelayan pengolah produk unggulan khas daerah		orang	0	0	0	50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		232,050,000		
		3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bintek bagi pengolah produk unggulan khas daerah		orang	0	0	15	50,000,000	15	55,000,000	15	60,500,000	15	66,550,000	60	232,050,000	DKP	Rote Ndao
		3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			0	0	0	390,000,000		455,000,000		558,500,000		614,350,000		#####		
		3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya diversifikasi olahan makanan serba ikan		kali	0	0	0	-	3	55,000,000	3	60,500,000	3	66,550,000	9	182,050,000	DKP	10 Kec.

							Tingkat angka konsumsi ikan	orang	0	0	80	40,000,000	10	10,000,000	80	40,000,000	80	44,000,000	250	134,000,000	DKP	10 Kec.	
							Pelaksanaan Lomba Inovasi Olahan Ikan	kelompok	0	0	0	-	10	30,000,000	10	33,000,000	10	36,000,000	30	99,000,000	DKP	10 Kec.	
		3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pra sarana yang terdistribusi ke pedagang ikan	unit	0	0	0	-	4	10,000,000	10	40,000,000	10	44,000,000	24	94,000,000	DKP	10 Kec.
							Rena Pasar ikan	unit	0	0	1	350,000,000	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	4	1,508,500,000		Rote Ndao	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T.C 28
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2019	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	3.529	3.697	3.738	3.820	4.124	4.292	4.292
2	Produksi budidaya rumput laut (ton)	15.746	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
3	Produksi perikanan budidaya (ton)	5,11	6	7	8	9	10	10
4	Konsumsi ikan (kg/kapita)	43,88	46,88	47,88	48,88	49,88	50,88	50,88
5	Cakupan bina kelompok nelayan	0,36	0,38	0,42	0,45	0,47	0,49	0,49

BAB VIII


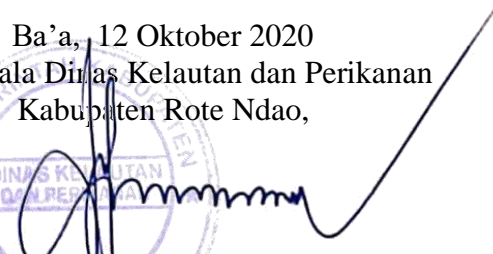
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 20019-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20019-2024, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao).

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor-sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dan kesungguhan hati dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan serta masyarakat pesisir melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Sekian dan terima kasih.

Ba'a, 12 Oktober 2020
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rote Ndao,



Drs. BENAY FORAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680121 199403 1 015